

## **BAB 6**

### **SARAN**

#### **6.1 Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 24 adalah sebagai berikut:

1. Apotek Kimia Farma 24 disarankan untuk dapat meningkatkan pelayanan seperti telefarma dan *follow up* sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran Apoteker dalam memonitoring efek terapi pasien.
2. Apotek Kimia Farma 24 hendaknya selalu mempertahankan kualitas pelayanan yang baik demi meningkatkan kenyamanan pasien saat berkunjung ke Apotek Kimia Farma 24.
3. Hendaknya pembekalan yang diberikan Kimia Farma dilakukan pada awal mulai PKPA agar mahasiswa dapat mempunyai bekal untuk belajar pada saat praktek profesi di apotek.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gunawan, S.G, Setiabudy, R. 2016. Farmakologi dan Terapi Edisi 6. Badan Penerbit FKUI, Jakarta.
- Joint Formulary Committee, 2017. British National Formulary, 74th ed. BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- McEvoy, G.K. (Ed), 2011. AHFS Drug Information Essentials. American Society of Health-System Pharmacists, Bethesda.
- Medscape, Drug and Disease. <http://reference.medscape.com> diakses pada tanggal 30 September 2019.
- MIMS, 2019. MIMS Indonesia (Version 1.6.0.7) [Mobile application software]. Retrieved from <http://play.google.com>.
- Pediatric Formulary Committee, 2018. British National Formulary for Children 2017-2018. BMJ Group, Pharmaceutical Press, and RCPCH Publications Ltd, London.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan.

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi, Saran, Prasarana, dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- PERKI. 2015. Pedoman Tata Laksana Sindrom Koroner Akut Edisi 3. Jakarta : Centa Communications.
- Shann, F., 2017. Drug Doses, 17th ed. Collective Pty, Melbourne.
- Sagung, Seto. 2017. Informatorium Obat Nasional Indonesia. Jakarta : Indonesia.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/1418/ VII/ 2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia.
- Sweetman, S.C., 2009. Martindale: The Complete Drug Reference, 36th ed. Pharmaceutical Press, London.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Widuri, Asti. 2009. Terapi Antibodi pada Rinitis Alergi. *Mutiara Medika*. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan. Vol. 9 No. 1:63-68.